

Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Siti Englan Nauli Harahap
Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

Pemerintah daerah sering bertentangan dengan tujuan individu untuk memenuhi tujuan dan kepentingan sehingga menghasilkan kinerja individu yang rendah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masing-masing individu akan berpengaruh pada kinerja pemerintah secara keseluruhan. Penelitian bertujuan menguji pengaruh komitmen organisasional dan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah di SKPD Pemprov. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 52 SKPD (seluruhnya dijadikan sampel). Pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer, yaitu kuesioner dengan menggunakan *Total Sampling*. Data diperoleh dari pegawai SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 5,727 + 0,720 X_1 + 0,380 X_2 + e$. Dengan determinan (R^2) sebesar 0,498 yang berarti besarnya pengaruh Komitmen Organisasional, Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 49,8% dan sisanya 50,2% variabel Kinerja manajerial SKPD dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis diterima dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa $X_1 (3,492)$ dan $X_2 (2,115) > 1,984$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. Kesimpulan menunjukkan komitmen organisasional dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Diharapkan kepada pihak Pemerintah sebaiknya menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya, sehingga kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah semakin lebih baik.

Keywords

Komitmen Organisasional, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Manajerial

PENDAHULUAN

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada sektor Pemerintahan, tujuannya bukanlah maksimalisasi laba tetapi lebih kepada publik *service orientif* (Suhayati, 2009). Pencapaian tujuan suatu Pemerintah daerah membutuhkan peran semua anggota yang ada dalam Pemerintahan. Agar tujuan Pemerintah mudah dicapai, maka diperlukan suatu pedoman yang disebut anggaran.

Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan tujuan organisasi semua manajer pada unit organisasi dibawahnya, untuk mengkoordinasikan kegiatan, dan untuk mengevaluasi kinerja manajer.

Menurut Hansen dan Mowen (2004:1), kelebihan dari suatu sistem anggaran diantaranya anggaran mendorong para manajer/kepala Dinas/Badan untuk mengembangkan arahan umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Anggaran juga memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya organisasi dan motivasi pegawai. Anggaran secara formal mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap pegawai. Jadi, semua pegawai dapat menyadari perannya dalam mencapai tujuan organisasi, maka dibutuhkan adanya koordinasi.

Peranan dan kepentingan individu dalam organisasi Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan Pemerintah daerah didasarkan pada ketertarikan individu untuk memenuhi tujuan dan kepentingan. Namun tujuan yang ditetapkan Pemerintah daerah sering bertentangan dengan tujuan individu sehingga menghasilkan kinerja individu yang rendah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja dari masing-masing individu tersebut akan berpengaruh pada kinerja Pemerintahan secara menyeluruh.

Agar pelaksanaannya berjalan efektif, para pelaksana berpartisipasi untuk merencanakan anggaran, yaitu sejauh mana partisipasi atau peran serta dalam penyiapan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpastian dari pegawai yang akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial (Kepala Dinas/Badan). Kinerja akan dikatakan efektif apabila pihak-pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan internal serta alokasi sumberdaya (Harsanti, 2008). Ketika suatu anggaran dirancang secara partisipatif maka pegawai akan memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapai standar yang ditetapkan karena mereka ikut serta terlibat dalam proses penyusunan yang akan berpengaruh pada tingkat kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk

menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat (Zeyn, 2011). Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan baru bidang pengelolaan keuangan Negara dan Daerah, diantaranya: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti dengan PP 58 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, serta UU Nomor 15 Tahun 2004. Reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasarkan pada pengelolaan keuangan Negara/Daerah (Rohman, 2007). Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen Pemerintahan. Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Hal ini menandakan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. Otonomi daerah menuntut adanya pengelolaan keuangan yang lebih bertanggungjawab (*akuntabel*) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan (Rohman, 2009).

Komitmen organisasional adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasinya. Jika komitmen organisasi telah diperoleh maka akan tercapailah tujuan organisasi, karena organisasi mendapat dukungan penuh dari anggotanya sehingga bisa berkonsentrasi secara penuh pada tujuan yang diprioritaskan. Dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Dimana loyalitas, keterlibatan, dan penerimaan terkait dengan kinerja manajerial organisasi. Penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja manajerial. Oleh sebab itu, apabila komitmen organisasinya baik, maka kinerjanya akan baik pula.

Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian Natalia (2010) tentang Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada sampel penelitiannya yaitu, penelitian terdahulu di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang bekerja sebagai pegawai eselon tiga dan eselon empat, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan lingkup yang lebih luas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner di antar langsung ke SKPD se Provinsi Sumatera Utara. Prosedur pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagikan secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuesioner akan dibagikan ke SKPD se Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner akan dibagi menjadi dua Bagian. Bagian pertama mengenai identitas responden, dan bagian kedua daftar pertanyaan mengenai komitmen organisasional, peran manajer pengelolaan keuangan daerah serta kinerja manajerial. Analisis data menggunakan *software* SPSS 17 dengan lima Analisis. Analisis pertama, statistik deskriptif. Analisis ke dua, pengujian kualitas data. Analisis ke tiga, melakukan uji asumsi klasik. Analisis ke empat, melakukan analisis regresi berganda. Dan analisis kelima pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data responden mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 responden (62,9%), berusia antara 36-45 tahun sebanyak 15 responden (42,9%), berpendidikan tingkat S1 sebanyak 17 responden (48,6%), dan lama bekerja antara 1-5 tahun sebanyak 20 responden (57,1%),

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Komitmen Organisasional Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk dalam kategori efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Provinsi Sumatera Utara telah diterapkan dengan efektif.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah

berpengaruh positif sebesar 3,492 pada tingkat signifikansi 0,001, yang berarti signifikan karena berada di bawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional yang efektif dapat meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Dengan kata lain, komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini sesuai dengan penelitian Natalia (2010) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Komitmen organisasional merupakan sikap yang sangat penting dalam bekerja di suatu organisasi pemerintahan. Seseorang yang memiliki komitmen organisasional di organisasi pemerintah dapat diharapkan memiliki pandangan yang positif serta berusaha memberikan yang terbaik dalam mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi.

Hasil analisis data tentang Peran Manajer Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah berada termasuk dalam kategori cukup efektif. Tetapi masih banyak juga pernyataan yang menyatakan bahwa pengelolaan laporan keuangan daerah kurang efektif. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pada setiap pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan manfaat umpan balik yang lebih baik sehingga pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang, serta laporan keuangan yang dihasilkan dapat disajikan dengan lebih tepat waktu dan disajikan secara lebih berkualitas dan lengkap.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah berpengaruh positif sebesar 2,115 pada tingkat signifikansi 0,042 yang berarti signifikan karena berada dibawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa peran manajer pengelolaan keuangan daerah yang tinggi dapat meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya suatu peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (kuasa pengguna anggaran/barang) untuk menunjukkan kinerja manajerial yang baik pada masing-masing SKPD. Peran yang dimainkan oleh para pengelola keuangan seperti peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan juga dapat berpengaruh kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa manajer yang memiliki peran tersebut akan mendorong para pengelola keuangan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD

sebesar 49,8%. Sedangkan sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil analisis F_{regresi} sebesar 15,847 dengan signifikan 0,000 ($p < 0,05$) menyatakan bahwa hipotesis alternatif dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian, Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hal ini berarti semakin meningkat komitmen organisasional dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah, maka kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Provinsi Sumatera Utara akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menguji Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Pengujian dengan menggunakan SPSS maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di pengaruhi oleh komitmen organisasi (0,001).
2. Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (0,042).
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional yang efektif dan peran manajerial yang baik dapat meningkatkan kinerja manajerial hasil penelitian ini sama dengan penelitian Natalia Dwindi (2010) pada SKPD Kabupaten Tegal

REFERENCES

- Aplikasi Kumpulan Kuesioner, 2011. Heneman, H.,G. Universitas Diponegoro
- Dewinda, Natalia. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Kabupaten Tegal)*. Universitas Diponegoro. Semarang
- E, Rosenzweig James. 2002. Organisasi dan Manajemen. Bumi Aksara
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Multivariate dengan program SPSS. Universitas Diponegoro. Semarang

- Harsanti, Ponny. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus*. Jurnal Akuntansi Vol. 7 No. 9 Oktober 2008
- [Http://www.Sumutdaily.com/Sumut-today/Kinerja-Pemprovsu](http://www.Sumutdaily.com/Sumut-today/Kinerja-Pemprovsu)
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Jakarta
- Mowen, Hansen. 2006. *Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta
- Natalyah, Eldes. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Ketidakpastian Lingkungan dengan Senjangan Anggaran (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi Swasta Medan)*. Universitas Negeri Medan
- Nordinawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Pangastuti, M. D, 2008, *Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi Pada Kabupaten Timur Tengah Utara) Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Pemerintah RI. 2005, Undang-undang No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah RI, Jakarta.
- Parise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan*. Indeks Pemerintah RI. 2005, Undang-undang No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah RI, Jakarta.
- Rohman, Abdul. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro. Jurnal Maksi Vol.7 No. 2 Agustus 2007 : 2006-220
- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Demak)*. Jurnal Akuntansi Vol. 4, No.2, Juli-Desember 2009
- S.K. Purwanto. 2004. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Modern*. Salemba Empat
- Suhayati, Ely. 2009. *Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Performance Audit*. Jurnal Akuntansi Vol. 6, No. 2 2009. 203-212
- Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-undang RI No. 24 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pemerintah

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatakan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.

[Www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)

Yudha, Riduan. 2008. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Daya Kepemimpinan Terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (studi Empiris BUMN di Medan)*. Universitas Negeri Medan

Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.1, April 2011. PP 21-37